

**Analisis Peran Aparatur Pemerintah Dalam Stigma Sosial Terhadap
Kesejahteraan Pekerja Seks Komersial**



NURLITA SAFITRI 2216041106

**UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA 2023/2024**

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Stigma sosial adalah stereotip atau persepsi yang tidak baik yang diasosiasikan kepada orang atau kelompok tertentu, termasuk pekerja seks komersial, yang berujung pada pengucilan sosial, marginalisasi, dan diskriminasi. Disini peran aparat pemerintah sangat penting untuk menangani dan mengatasi stigma sosial dalam kesejahteraan bagi para pekerja seks komersial.

Prostitusi dianggap sebagai kelainan sosial dalam bidang ilmu sosial. Oleh karena itu, dalam hal ini, masyarakat memberikan stigma yang sangat buruk tidak hanya pada pekerja seks komersial itu sendiri tetapi juga pada keturunan mereka. Anak-anak dari pekerja seks komersial sering diasosiasikan secara tidak baik oleh masyarakat karena mereka dianggap memiliki pengaruh yang berbahaya bagi anak-anak lain.

Karena ekonomi Indonesia yang masih rapuh, "mereka" beralih ke seks untuk mengisi pundi-pundi rupiah. Wanita berada dalam posisi yang sama sekali berbeda dengan pria dalam perekonomian. Dibandingkan dengan pria, wanita lebih sulit mendapatkan pekerjaan. Akibatnya, pekerjaan yang melibatkan seks selalu dipegang oleh perempuan. Orang yang melakukan pekerjaan ini dikenal dengan sebutan pekerja seks komersial (PSK) di masyarakat. Kedudukan perempuan dalam kehidupan sosial selalu berada pada posisi yang sangat rawan.

Lapangan pekerjaan saat ini merupakan salah satu tantangan sosial, seperti yang kita ketahui bersama. Pertumbuhan kriteria kualifikasi pekerjaan membuat orang sulit untuk mendapatkan pekerjaan karena sedikitnya jumlah posisi yang sesuai dengan tingkat pendidikan setiap tahunnya. Menjadi Pekerja Seks Komersial (PSK) adalah salah satu cara sederhana bagi para pekerja wanita dengan tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah untuk mewujudkan impiannya untuk mendapatkan penghidupan yang layak (Hurri & Mulyadi).

Pelacuran dipandang sebagai pelanggaran moral di Indonesia. Prostitusi, menurut Gognon (1968), adalah tindakan menawarkan layanan seksual dengan imbalan produk atau uang tunai. Ia memandang prostitusi sebagai fenomena dalam masyarakat di mana perempuan menjual diri mereka kepada mereka yang membutuhkan dengan imbalan bantuan atau akses

seksual sebagai cara untuk bertahan hidup. Pekerja seks komersial merupakan fenomena yang muncul dari berbagai masalah yang kompleks, seperti prospek ekonomi yang terbatas, ketidakmampuan untuk memilih pilihan lain, dan inisiatif pemerintah yang tidak terfokus dengan baik sehingga memperburuk ketimpangan sosial dan kemiskinan (Ekberg, 2004) (Persada, 2021).

Sebagian masyarakat percaya bahwa tempat prostitusi hanya memberikan dampak negatif bagi masyarakat dan menimbulkan kerugian karena profesi prostitusi sering dihubungkan dengan hal-hal yang tidak diinginkan, khususnya dengan penyakit masyarakat yang mengganggu ketertiban dan keindahan (Nawir, 2018). Masyarakat kemudian melabeli keturunan pekerja seks komersial karena mereka percaya bahwa hal ini akan menimbulkan kecaman.

Meskipun prostitusi merupakan hal yang ilegal karena melanggar moral, agama, dan budaya, namun tidak dapat dipungkiri bahwa terkadang kegiatan prostitusi terus berkembang bahkan semakin terorganisir dan profesional (Bawole, 2013). Isu prostitusi di masyarakat bukanlah hal yang baru, banyak anak muda yang dieksploitasi dan akhirnya terjerumus ke dalam industri prostitusi. Sekitar 150.000 anak menjadi korban eksploitasi, menurut Sumadi Wijaya dari Tim Koalisi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (Hidayat, 2019). Perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pada Pasal 68, yaitu: Perlindungan hukum terhadap pekerja seks komersial anak secara khusus dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi, serta bantuan hukum (Utami & Wadjo, 2021).

Seorang pekerja seks komersial tidak diragukan lagi dianggap tidak baik di setiap lapisan masyarakat, dan persepsi ini tidak hanya berlaku untuk individu itu sendiri tetapi juga untuk keluarga mereka. Penilaian masyarakat terhadap sesuatu atau seseorang didasarkan pada persepsi visual dan pendengaran. Penilaian dapat dilakukan terhadap hal-hal selain yang dapat dilihat atau didengar, seperti orang atau benda lain. Ada kegiatan dalam kehidupan sehari-hari yang dianggap benar atau salah dan dinilai oleh masyarakat secara individual. Penilaian ini juga dapat mempertimbangkan posisi atau bidang pekerjaan seseorang, tanpa memandang jenis kelamin.

Masyarakat umum memiliki pandangan yang kurang baik terhadap anak-anak pekerja seks komersial karena anak-anak tersebut tinggal atau ikut dengan ibunya ke tempat lokalisasi, di mana mereka menjadi terbiasa melihat aktivitas di tempat lokalisasi. Anak-anak pekerja seks komersial mendapat stigma karena masyarakat merasa bahwa mereka pasti memiliki moral yang lemah.

Teori stigma Erving Goffman menyatakan bahwa stigma sosial muncul ketika seseorang dicap negatif karena dianggap berada di luar norma-norma masyarakat. Perilaku, identitas, dan kesejahteraan seseorang dapat dipengaruhi oleh stigma sosial. Stigmatisasi sosial terhadap PSK dapat membahayakan kesejahteraan mereka dan memperburuk keadaan sosial ekonomi mereka yang sudah sulit.

Stigma sosial juga dapat mempengaruhi kesehatan mental dan fisik PSK. Mereka mungkin merasa malu atau tidak nyaman untuk mencari bantuan kesehatan karena stigma sosial yang melekat pada pekerjaan mereka. Stigma sosial juga dapat mempengaruhi hubungan sosial PSK dengan keluarga, teman, dan masyarakat umum. Mereka mungkin diasingkan atau dijauhi oleh orang-orang terdekat mereka karena stigma sosial yang melekat pada pekerjaan mereka.

Stigma sosial terhadap PSK dapat mempengaruhi keputusan mereka dalam memilih pekerjaan. Beberapa PSK mungkin merasa terpaksa untuk melakukan pekerjaan tersebut karena kurangnya alternatif pekerjaan yang tersedia, sementara yang lain mungkin memilih pekerjaan tersebut karena faktor ekonomi. Stigma sosial juga dapat mempengaruhi perilaku dan praktik seksual PSK. Mereka mungkin merasa sulit untuk mencari informasi atau bantuan terkait kesehatan seksual dan reproduksi karena stigma sosial yang melekat pada pekerjaan mereka.

Stigma sosial juga dapat mempengaruhi keamanan PSK. Mereka mungkin menjadi target kekerasan atau eksploitasi karena kurangnya perlindungan hukum dan sosial yang tersedia bagi mereka. Stigma sosial terhadap PSK dapat menjadi penghalang dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Banyak program dan inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan PSK seringkali mengalami kesulitan dalam mengatasi stigma sosial yang melekat pada pekerjaan mereka.

Stigma sosial terhadap PSK juga dapat berdampak pada masalah keamanan publik. Terkadang, PSK harus bekerja di tempat-tempat yang tidak aman, seperti di jalanan atau tempat-tempat terpencil. Stigma sosial yang melekat pada pekerjaan mereka dapat membuat mereka lebih rentan menjadi korban kejahatan atau kekerasan.

PSK sering kali tidak memiliki akses yang memadai terhadap layanan kesehatan dan keselamatan, seperti kondom atau obat-obatan untuk mencegah atau mengobati penyakit menular seksual. Stigma sosial yang melekat pada pekerjaan mereka dapat membuat mereka malu atau takut untuk mencari layanan kesehatan tersebut.

Stigma sosial terhadap PSK juga dapat mempengaruhi kesehatan reproduksi mereka. PSK mungkin tidak memiliki pengetahuan atau akses terhadap kontrasepsi, atau merasa sulit untuk mencari bantuan medis saat mengalami masalah kesehatan reproduksi. Hal ini dapat berdampak pada kesehatan mereka secara keseluruhan.

Keterbatasan dalam upaya untuk mengatasi stigma sosial terhadap PSK dapat menjadi penghalang dalam meningkatkan akses mereka terhadap sumber daya dan kesempatan yang tersedia. PSK mungkin tidak dapat memanfaatkan program pendidikan atau pelatihan pekerjaan yang tersedia, atau tidak diizinkan mengakses pelayanan publik seperti layanan kesehatan dan sosial.

Prostitusi merupakan masalah bagi masyarakat pada umumnya dan keluarga pada khususnya, merusak moral bangsa, dari sifat materialisme hingga kemajuan teknologi, aspek globalisasi zaman memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap prostitusi, masih banyak lokasi prostitusi legal di setiap daerah karena keterlibatan pemerintah dalam menangani prostitusi masih kurang.

Meskipun stigma sosial terhadap PSK masih sangat kuat, ada upaya-upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk mengatasi masalah ini. Beberapa LSM dan kelompok aktivis telah bekerja untuk meningkatkan kesadaran dan membawa perubahan sosial terhadap stigma sosial terhadap PSK. Selain itu, beberapa program telah dirancang untuk membantu PSK meningkatkan kesejahteraan mereka, seperti program pelatihan keterampilan atau dukungan kesehatan

Masyarakat kelas menengah ke bawah terkena dampak dari kesulitan sosial ekonomi. Masalah sosial dalam kehidupan bermasyarakat berkembang sebagai akibat dari kesulitan memenuhi kebutuhan dasar. Jika masalah pekerjaan dibagi atau diklasifikasikan menjadi masalah pekerjaan laki-laki dan perempuan, maka akan timbul masalah. Pekerjaan itu sendiri akan menimbulkan masalah bagi laki-laki dan perempuan. Pembagian kelas terlihat jelas pada pilihan karir dan kesempatan yang masih terbatas dalam setiap kesempatan kerja, terutama bagi karyawan perempuan.

Mengingat sulitnya melacak penyebab masalah sosial ini dan hambatan yang ditimbulkan oleh selera manusia yang tidak pernah terpuaskan, maka hal ini menjadi sangat menantang untuk diatasi. Manusia memiliki dorongan seksual yang tidak pernah terpuaskan. Ketika berbicara tentang seks, moral dan prinsip menjadi hal yang tidak terlalu penting.

Sejarah PSK dimulai sejak masa kuno di berbagai negara di dunia, seperti Yunani dan Mesir Kuno. Pekerja seks dalam sejarah kuno sering dianggap sebagai orang yang sangat penting dalam kehidupan sosial dan agama. Di Eropa, pada abad ke-15, pemerintah di beberapa negara mulai memberlakukan undang-undang yang membatasi kebebasan perempuan dalam melakukan aktivitas seksual. Perempuan yang melanggar undang-undang tersebut sering dihukum dengan mengenakan tanda-tanda yang menandakan bahwa mereka adalah pelacur.

Di Inggris, pada awal abad ke-18, prostitusi sering diatur oleh pemerintah. Pekerja seks diharuskan untuk mendaftar dan membayar pajak, serta ditempatkan di daerah-daerah tertentu. Di Amerika Serikat, pada akhir abad ke-19, kegiatan prostitusi menjadi sangat berkembang di kota-kota besar seperti New York dan Chicago. Dalam beberapa kasus, perempuan yang terlibat dalam prostitusi dianggap sebagai korban dan tidak dihukum.

Selama Perang Dunia II, banyak pasukan tentara yang melakukan hubungan seks dengan pekerja seks yang ditunjuk oleh pemerintah. Beberapa negara seperti Inggris, Kanada, dan Australia bahkan membuka rumah bordil khusus untuk pasukan mereka. Seiring perkembangan zaman, kegiatan prostitusi semakin berkembang di berbagai negara di dunia. Meskipun ada beberapa negara yang mengatur prostitusi dan melindungi hak-hak pekerja seks, banyak negara yang masih melarang kegiatan tersebut dan menganggapnya sebagai kejahatan.

Di Indonesia, pekerja seks mulai dikenal sejak masa penjajahan Belanda. Pada saat itu, banyak wanita pribumi yang dijadikan pelacur oleh para tentara Belanda. Setelah Indonesia merdeka, prostitusi semakin berkembang dan pada tahun 1967, pemerintah Indonesia melarang kegiatan prostitusi.

Dalam beberapa kasus, perdagangan seks dipaksa melalui perbudakan seksual. Dalam situasi ini, orang-orang dipaksa untuk menjadi PSK dengan ancaman atau tindakan kekerasan, atau dengan memberi mereka obat-obatan terlarang. Banyak korban perdagangan seks di seluruh dunia berasal dari negara-negara miskin atau daerah yang terkena konflik, dan sering menjadi korban kekerasan fisik dan seksual, serta terpapar risiko kesehatan yang lebih tinggi.

Sejak lama, isu prostitusi dan perdagangan seks telah menjadi topik kontroversial dalam berbagai negara. Beberapa negara seperti Belanda, Jerman, dan Nevada di Amerika Serikat, telah melegalkan prostitusi, sementara negara lain, seperti Swedia dan Prancis, telah mengadopsi pendekatan yang lebih keras terhadap perdagangan seks dan memperketat hukuman bagi pelaku. Meskipun legalisasi prostitusi bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi para pekerja seks, masih ada pertentangan dan kontroversi dalam pengaturannya.

Prostitusi termasuk dalam wilayah patologi sosial, seperti halnya apa yang saat ini disebut sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK). Pelanggaran sosial selalu terjadi di masyarakat, baik yang dilakukan secara bebas maupun tidak. Karena fenomena ini sudah ada sejak awal peradaban manusia, maka tidak ada kebudayaan yang dapat menghindarinya. Interaksi sosial di antara anggota kelompok terkadang dapat mengakibatkan kesalahpahaman yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam budaya tersebut.

Menjadi Pekerja Seks Komersial (PSK) adalah pekerjaan yang menyedihkan dalam hal pendidikan. PSK adalah pekerjaan yang merendahkan perempuan dalam hal kewanitaan. Dari segi ekonomi, prostitusi di dunia nyata sering kali mengarah pada pemerasan tenaga kerja. Dari sisi medis, prostitusi merupakan metode yang sangat efisien untuk penyebaran penyakit ginekologi dan kelamin yang berbahaya. Dari sudut pandang kamtibmas, prostitusi merupakan praktik yang dapat mengakibatkan tindak kriminalitas. Prostitusi dapat mengurangi estetika dan kualitas lingkungan perkotaan dari sudut pandang tata kota. Setiap masalah dapat diselesaikan dengan mengambil sikap yang manusiawi.

Interaksi manusia, seperti yang diketahui secara umum, mencakup interaksi dengan lingkungan dan interaksi satu sama lain. Interaksi dengan lingkungan, dalam arti luas, dapat merujuk pada bagaimana anggota suatu komunitas terlibat dengan beragam budaya, cara hidup, dan karakteristik regional yang lazim di negara tempat komunitas tersebut bernaung. Hal ini dapat terwujud dalam bentuk kondisi moneter, situasi keamanan, peraturan pemerintah, dan sebagainya.

Banyak LSM dan kelompok aktivis telah berupaya untuk meningkatkan kesadaran tentang masalah yang dihadapi oleh PSK dan memperjuangkan hak-hak mereka. Kelompok-kelompok ini termasuk organisasi yang berfokus pada hak-hak pekerja seks, seperti International Union of Sex Workers dan Sex Workers Outreach Project, serta LSM yang lebih luas yang mendukung hak asasi manusia dan perlindungan korban perdagangan manusia.

Terkait prostitusi, pemerintah telah membuat banyak peraturan dan undang-undang. Untuk menemukan solusi atas masalah ini, organisasi-organisasi internasional juga telah mendukung gerakan-gerakan perempuan. Meskipun demikian, mayoritas gerakan perempuan di seluruh dunia masih dipimpin oleh perempuan borjuis yang tidak peduli dengan keterampilan atau pengalaman perempuan proletar dalam memperjuangkan kesetaraan. (Nur & Mukramin, 2023)

Di Indonesia sendiri, perempuan memiliki dampak yang signifikan terhadap perekonomian. Untuk melindungi perempuan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang menyelundupkan mereka untuk dijual dan digunakan sebagai PSK, kelompok-kelompok swadaya masyarakat perempuan telah bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan di daerah-daerah. Namun, ketika mereka memilih untuk menjadi PSK, segalanya akan berbeda. Sosialisasi dan konseling saja tidak dapat mengakhiri siklus prostitusi. Mereka membutuhkan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. (Balai et al., n.d.)

Kebijakan publik menjadi alat yang digunakan pemerintah untuk mempromosikan kesejahteraan sosial, maka sangat penting bahwa kebijakan publik harus dapat mengatasi masalah-masalah yang perlu diatasi selama pembuatan dan pelaksanaannya. Karena kebijakan publik mempengaruhi kepentingan seluruh masyarakat, maka kebijakan publik diakui sebagai isu yang krusial. Menurut Thomas Dye, ia menegaskan bahwa ia percaya kebijakan publik digunakan untuk meningkatkan kehidupan masyarakat. (Islam et al., 2019)

Dalam upaya memahami dan mengerti suatu kondisi yang terjadi sesuai dengan kenyataan di lapangan, permasalahan yang muncul di masyarakat menjadi sebuah konstruksi diskusi yang bertujuan untuk menghasilkan solusi melalui berbagai jenis pertanyaan tentang bagaimana isu dan masalah disusun dan didefinisikan. Menurut penilaian Thomas Dye dalam Rian Nugroho:

“Kebijakan publik itu sebagai segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan hasil yang membuat sebuah kehidupan bersama tampil berbeda “(what government do, why they do it, and what difference it makes.”

Untuk mencapai kebaikan bersama, atau kepentingan seluruh masyarakat, pemerintah memiliki kekuasaan untuk melakukan perubahan di semua bidang kehidupan. Dalam hal ini, kebijakan publik merupakan tanggung jawab pemerintah. Menurut Woll yang dikutip oleh Tangkilisan, *"kebijakan publik adalah sejumlah kegiatan pemerintah untuk memecahkan masalah dalam masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat."*

Kebijakan publik bukan hanya sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga menerima masukan dari lembaga-lembaga non-pemerintah yang memiliki kekuatan untuk mengontrol semua nilai yang dipengaruhi oleh pemerintah.

Lembaga-lembaga tersebut memiliki kekuatan untuk mengontrol setiap nilai yang menjadi pertimbangan sebuah kebijakan. Lembaga swadaya masyarakat ini didirikan oleh anggota masyarakat yang ingin membuat sebuah fasilitas dengan fokus penelitian yang spesifik agar kebijakan publik dapat menyentuh seluruh aspek kehidupan masyarakat, bukan hanya satu aspek saja. Kebijakan publik tidak hanya mencakup satu aspek saja, tetapi harus mampu mencakup semua aspek kehidupan sehari-hari.

Pandangan Masyarakat terhadap Strategi Politik untuk Menyelesaikan Masalah Sosial Pemerintah juga harus memperhatikan penyelesaian masalah sosial seperti pembinaan untuk menciptakan keluarga yang damai. Hal ini karena salah satu pilar masyarakat yang mempengaruhi kualitas generasi adalah keluarga. Untuk memastikan bahwa penduduknya memiliki otak dan keterampilan yang dibutuhkan, negara harus menjamin pendidikan. Hal ini berkaitan dengan prinsip kedua yang telah disebutkan di atas, yaitu agar setiap orang dapat bekerja secara terus menerus untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara memuaskan dan halal.

1.2 Fokus Penelitian

Pada makalah ini penelitian yang saya gunakan fokus kepada bagaimana para aparatur pemerintah berkontribusi dan memperbaiki kesejahteraan stigma sosial terhadap pekerja seks komersial. Hal ini dapat mencakup pemeriksaan terhadap bagaimana masyarakat memandang pekerja seks komersial sehubungan dengan hukum dan pembatasan yang diterapkan pemerintah terhadap mereka. Dan juga pemerintah disini berdedikasi untuk menjadi penyambung jembatan bagi masyarakat sehingga tindakan yang kurang mengenakan terhadap PSK bisa segera diatasi, agar para mantan PSK ini juga bisa mendapatkan kehidupan yang jauh lebih layak daripada sebelumnya.

1.3 Rumusan Masalah

1. Apa saja upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi stigma sosial terhadap pekerja seks komersial dan meningkatkan kesejahteraan mereka?
2. Bagaimana stigma sosial terhadap pekerja seks komersial terbentuk di masyarakat?
3. Bagaimana stigma sosial terhadap pekerja seks komersial mempengaruhi kesejahteraan mereka?

1.4 Tujuan Penelitian

Untuk membantu masyarakat mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana perwakilan pemerintah berkontribusi terhadap stigma sosial yang diberikan kepada pekerja seks komersial dan bagaimana stigma tersebut mempengaruhi kesejahteraan mereka. Tujuan penelitian ini juga mencakup penilaian terhadap inisiatif pemerintah untuk mengurangi stigma masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan pekerja seks komersial.

Selain itu, dapat pula diidentifikasi program dan kebijakan yang berhasil dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja seks komersial serta faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam merancang program dan kebijakan tersebut dengan cara mengevaluasi upaya pemerintah dalam memerangi stigma sosial dan meningkatkan kesejahteraan pekerja seks komersial.

1.5 Manfaat Penelitian

Memperdalam pemahaman kita tentang bagaimana stigma sosial mempengaruhi kesehatan pekerja seks komersial. Dengan memahami dampak stigma sosial terhadap kesejahteraan pekerja seks komersial, kita dapat menargetkan upaya-upaya untuk meningkatkan akses pekerja seks komersial terhadap sumber daya kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan, serta meningkatkan kesejahteraan psikologis dan fisik mereka.

Diperlukan juga penilaian terhadap inisiatif pemerintah untuk mengurangi stigma masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan pekerja seks komersial. Dengan mengevaluasi upaya pemerintah dalam memerangi stigma sosial dan meningkatkan kesejahteraan pekerja seks komersial, dapat diidentifikasi program dan kebijakan yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja seks komersial serta faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam merancang program dan kebijakan tersebut.

1.6 Metodologi Penelitian

Metode yang di gunakan pada penelitian ini yaitu kualitatif dan dalam penelitian ini saya menggunakan strategi yang melibatkan pencarian informasi dari berbagai sumber literatur, seperti buku, esai, jurnal, dan materi terkait lainnya. Tujuan dari tinjauan literatur ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran aparat pemerintah dalam pengembangan dan pemeliharaan stigma sosial terhadap pekerja seks komersial.

DAFTAR PUSTAKA

- Balai, M., Penelitian, B., Pelayanan, P., Sosial, K., Kementerian,), Ri, S., Kesejahteraan, J., No, S., & Yogyakarta, S. (n.d.). *Dampak Penutupan Lokalisasi Terhadap Pekerja Seks Komersial (PSK)*.
- Islam, U., Raden, N., Lampung, I., Endro, J., & Lampung, B. (2019). PERSEPSI TOKOH MASYARAKAT TERHADAP ASPEK POLITIK EKSISTENSI PEKERJA SEKS KOMERSIAL (PSK) DI EKS LOKALISASI RAWA LAUT PANJANG SELATAN BANDAR LAMPUNG M.SIDI RITAUDIN. *Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 15(8), 2655–6057. <https://http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index>
- Nur, D., & Mukramin, un. (2023). Labelling Terhadap Anak Pekerja Seks Komersial di Pantai Salukaili Pasangkayu. *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, 3(3).
- Fahrudin Ali Sabri. (2022). *Kekerasan terhadap Pekerja Seks Komersial di Madura*. Airlangga University Press
- K. Hairuddin, (2022). *Advokasi Penggunaan Kondom Pada Pekerja Seks Komersial Dalam Rangka Mengantisipasi Penularan HIV/AIDS*. CV. AZKA PUSTAKA
- Andris Noya. (2022). *Melawan Stigma*. Penerbit Adab